

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, GOOD GOVERNANCE, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

THE EFFECT OF HUMAN RESOURCES COMPETENCY, GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS, GOOD GOVERNANCE, AND INTERNAL CONTROL SYSTEMS ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS

Istiqomah Shinta Philadhelphia

Sri Suryaningsum

Sriyono

UPN "Veteran" Yogyakarta

ispiladhelphia@gmail.com

srisuryaningsum@upnyk.ac.id

sriyono_upnvy@yahoo.com

Abstract

The aim of this research is to know Human Resource Competency, The Effect Of Government Accounting, Good governance, and Internal Control System on the Quality of Local Government Financial Reports. The method of data collection in this study uses questionnaire techniques. This study used a census sampling method with 95 respondents in the Regional Organization of Klaten Regency. The analysis used is multiple linear regression analysis using SPSS (Statistical Product and Service Solutions) version 20. The result of this study indicates that the variable Government Accounting Standards, and Good governance affect the variable Quality Of Local Government Financial Reports. While the variable Human Resource Competency, and Internal Control System does not affect the variable of Quality Of Local Government Financial.

Keywords: *Human Resource Competency, Government Accounting Standards, Good governance, Internal Control System, Quality Of Local Government Financial Reports.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, Good governance dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode census sampling dengan 95 responden pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 20. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan, dan good governance mempengaruhi variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Kompetensi Sumber Daya Manusi, Standar Akuntansi Pemerintah, Good governance, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*

A. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019). Informasi mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sangat penting dan dibutuhkan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah untuk menilai akuntabilitas dan memutuskan kebijakan sosial, politik, maupun ekonomi baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya, agar terwujudnya *good governance* (Ratifah & Ridwan, 2012). Pengelolaan anggaran daerah harus sinkron dengan kebijakan nasional (Suryaningsum, 2015).

Berdasarkan opini dari BPK yang dilihat dari website BPK Jawa Tengah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten selama enam tahun terakhir yaitu tahun 2012-2017 mendapat opini WTP sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2014 dan 2015, sedangkan pada tahun 2012, 2013, 2016 dan 2017 mendapatn opini WDP. Pada pemeriksaan LKPD Kabupaten Klaten tahun 2017 BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten TA 2017 menyebutkan salah satu penyebab kegagalan itu lantaran ketidakvalidan laporan saldo Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Laporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai tak valid sehingga Pemkab Klaten kembali meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP). Selain itu selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2016 dan 2017 Pemkab Klaten hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ketidakkonsisten Isiannya penilaian pada Pemkab Klaten atas opini BPK RI untuk

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi pertanyaan besar apakah yang terjadi dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya LKPD berkualitas agar mendapat opini WTP dari BPK menurut Evicahyani & Setiawina, (2016) yaitu kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah. Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut Herawati & Nopianti, (2017) yaitu *Good governance* dan menurut Herawati, (2014) yaitu sistem pengendalian internal.

Menurut roviyantie, (2011) laporan keuangan merupakan sebuah produk yang seharusnya dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian mengenai pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, akan tetapi memunculkan hasil yang inkonsistensi. Penelitian Kiranayanti & erawati, (2016) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD, tetapi pada penelitian Komarasari, (2016) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menjelaskan tentang pengertian dari SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan keuangan pemerintah. Penelitian mengenai pengaruh SAP terhadap kualitas LKPD sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, akan tetapi memunculkan hasil yang inkonsistensi. Pada penelitian (Herawati & Nopianti, 2017) menunjukkan hasil bahwa SAP berpengaruh terhadap kualitas LKPD, tetapi penelitian (sari, 2016) menunjukkan bahwa SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 menjelaskan definisi Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian mengenai

pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas LKPD sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, akan tetapi memunculkan hasil yang inkonsistensi. Pada penelitian Evi Cahyani & Setiawina, (2016) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tetapi Mokoginta, et al (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Good governance adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society) (UNDP). Penelitian mengenai pengaruh *good governance* terhadap kualitas LKPD sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, akan tetapi memunculkan hasil yang inkonsistensi. Penelitian Anggreni, et al (2018) menunjukkan bahwa *Good governance* berpengaruh yang signifikan terhadap kualitas LKPD tetapi pada penelitian Sari & Fadli, (2016) menunjukkan bahwa *Good governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

B. Teori dan Pengembangan Hipotesis

1. Teori Agensi

Penjelasan tentang *agency theory* menurut Jensen & Meckling, (1976) hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama principal serta memberi kewenangan kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal.

2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengembalian keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Rasdianto, 2013).

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya (Mangkunegara, 2012). Menurut Warisno, (2008) dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan, hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada.

4. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010). Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan. Standar Akuntansi Pemerintah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan.

5. *Good Governance*

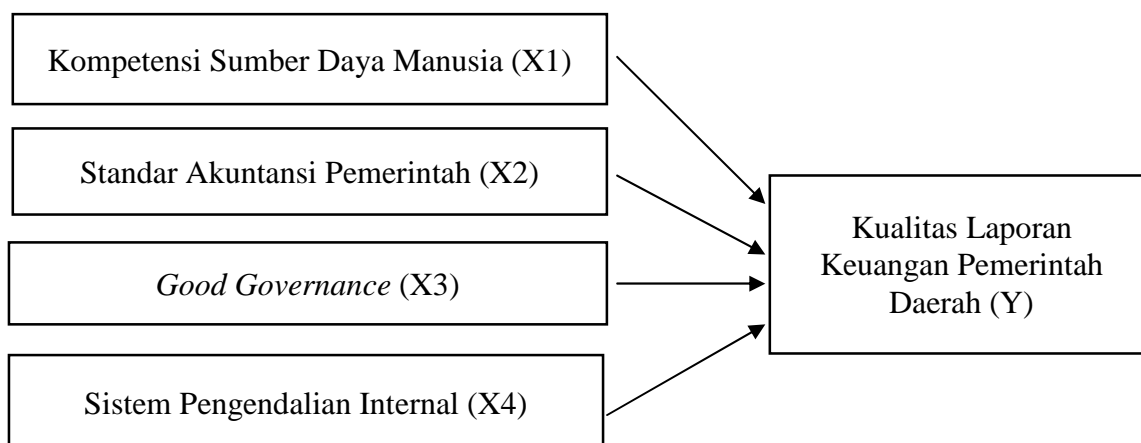
Good governance adalah pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Pendapat wakil Presiden tahun 2012 Bapak Boediono dalam Herawati & Nopianti, (2017) yang menyatakan bahwa ketertiban dalam penggunaan uang pemerintah dan basis dari perbaikan yang disebut dengan istilah *good governance* tidak akan berhasil, jika laporan keuangan tidak memenuhi kualitas. Jadi, laporan keuangan yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk mencapai predikat *good governance*.

6. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008).

7. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh variabel independen yaitu kompetensi SDM, standar akuntansi pemerintah, good governance, sistem pengendalian internal terhadap variabel dependen yaitu kualitas LKPD. Oleh karena itu dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

8. Pengembangan Hipotesis

Hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mendasarkan pada teori agensi, adanya kompetensi sumber daya manusia maka pemerintah yang bertindak sebagai agent yang diberi kewenangan oleh principal diharapkan dapat bekerja dengan kemampuan kompetensi sumber daya manusia pada setiap pegawai bagian keuangan dengan baik atau maksimal sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas baik. Semakin baik atau maksimal kompetensi sumber daya manusia

pada setiap pegawai bagian keuangan di OPD yang bekerja maka kualitas laporan keuangan juga semakin baik.

Hubungan standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mendasarkan pada teori agensi, Adanya aturan tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maka pemerintah yang bertindak sebagai *agent* yang diberi kewenangan oleh *principal* diharapkan dapat membuat laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dengan mematuhi aturan atau prinsip yang telah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mendapat opini WTP dari BPK. Semakin mematuhi aturan SAP dalam pembuatan LKPD maka laporan keuangan pemerintah daerah semakin berkualitas.

Hubungan *good governance* dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mendasarkan pada teori agensi, Adanya *good governance* maka pemerintah yang bertindak sebagai *agent* diberi kewenangan oleh *principal* diharapkan dapat menjalankan pengelolaan pemerintahan yang baik dan terbuka oleh publik, dengan terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintahan daerah dengan para pengguna informasi keuangan pemerintah (*principal*) sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi meningkat. *Good governance* digunakan instansi pemerintah untuk menjadi acuan agar terwujudnya pemerintahan yang kinerjanya dipercaya oleh masyarakat. Melalui *good governance* maka akan tersusun pelaksanaan kinerja pegawai bagian keuangan yang baik sehingga mempermudah dalam proses pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah (Anggara, 2012).

Hubungan sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mendasarkan pada teori agensi, Adanya sistem pengendalian internal maka pemerintah yang bertindak sebagai *agent* yang diberi kewenangan oleh *principal* diharapkan dapat mengambil keputusan yang terbaik dan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian internal digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengontrol dan mengevaluasi seluruh aktivitas dan tanggung jawab kegiatan. Melalui sistem pengendalian internal yang efektif maka akan tersusun pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang baik. Semakin efektif sistem pengendalian

internal yang diterapkan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin baik juga.

Berdasarkan kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis diatas, maka dapat dinyatakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas LKPD.

H2: Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas LKPD

H3: *Good Governance* berpengaruh terhadap Kualitas LKPD.

H4: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas LKPD.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer. Data diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2011). Pada penelitian ini termasuk penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sekaran & Bougie, (2017) pengertian pendekatan kuantitatif adalah metode ilmiah yang datanya berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan perhitungan matematika atau statistika. Penelitian kausal merupakan kegiatan penelitian yang berusaha mencari informasi yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap perubahan pada nilai variabel dependen (Hartono, 2016).

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh Kompetensi SDM, Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance*, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas LKPD. Model penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistik yaitu dengan menggunakan perangkat lunak SPSS.

1. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan daerah pada setiap OPD Kabupaten Klaten khususnya sub bagian keuangan beserta seluruh staf/ pegawai dengan jumlah 20 OPD dengan rincian 16 Dinas dan 4 Badan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *census sampling*/ sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel berjumlah 95 responden.

2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Rasdianto, 2013). Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) diukur dengan instrumen pernyataan yang dikembangkan oleh Sudiarianti (2015) dengan 4 dimensi yang terdiri dari 7 instrumen pernyataan dan menggunakan skala *likert* dengan skor 1 sampai 4. Yaitu, 1 (STS=sangat tidak setuju), 2 (TS=Tidak setuju), 3 (S=setuju), dan 4 (SS=sangat setuju).

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya (Mangkunegara, 2012). Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) diukur dengan 3 dimensi yang terdiri dari 8 indikator pernyataan yang dikembangkan dari penelitian (Sudiarianti, 2015) dan menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai 4 yaitu skor 1 (STS = sangat tidak setuju), skor 2 (TS = Tidak setuju), skor 3 (S = setuju), dan skor 4 (SS = sangat setuju).

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No. 71 tahun 2010). Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X2) diukur dengan 11 dimensi yang terdiri dari 17 indikator pernyataan yang dikembangkan dari penelitian Sudiarianti (2015) dan menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai 4 yaitu skor 1 (STS = sangat tidak setuju), skor 2 (TS = Tidak setuju), skor 3 (S = setuju), dan skor 4 (SS = sangat setuju).

Good Governance menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Variabel *Good Governance*(X3) diukur dengan 9 indikator pernyataan yang dikembangkan dari penelitian Kurniasari (2018) dan menggunakan skala *likert* dengan skor 1 sampai 4 yaitu skor 1 (STS = sangat tidak

setuju), skor 2 (TS = Tidak setuju), skor 3 (S = setuju), dan skor 4 (SS = sangat setuju).

Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 tahun 2008). Variabel sistem pengendalian internal (X_4) diukur dengan instrumen pernyataan yang dikembangkan oleh penelitian Pangastuti (2018) dengan 5 dimensi yang terdiri dari 7 instrumen pernyataan dan menggunakan skala *Likert* dengan skor 1 sampai 4, yaitu, 1 (STS=sangat tidak setuju), 2 (TS=Tidak setuju), 3 (S=setuju), dan 4 (SS=sangat setuju).

D. Hasil dan Pembahasan

Jumlah kuesioner yang dikirimkan sejumlah 95 kuesioner terdistribusi kepada 20 OPD yang meliputi 16 dinas dan 4 badan. Besarnya jumlah kuesioner yang kembali yaitu 91 kuesioner. Total jumlah kuesioner yang diproses dan diolah sejumlah 90 kuesioner, sedangkan 1 kuesioner lainnya tidak dapat diolah karena pengisiannya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kriteria penelitian.

1. Uji Validitas

Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut yang diketahui apabila memiliki nilai signifikansi *Pearson Correlation* pada level 0,05 (Ghozali, 2018). Hasil uji validitas variabel menunjukkan bahwa semua indikator memiliki tingkat signifikan $p\text{-value} < 0,05$. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa semua indikator variabel adalah valid, yang berarti semua indikator memiliki kemampuan menjelaskan masing-masing variabel.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan fasilitas *Cronbach Alpha* yang terdapat dalam SPSS. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Kuesioner dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil analisis menggunakan *Cronbach's Alpha* () hasil Uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* () untuk setiap variabel adalah lebih besar dari 0,70. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, *good governance*, dan sistem pengendalian internal memiliki tingkat akurasi, konsistensi, dan ketepatan yang cukup baik (reliabel).

3. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametik *Kolgomorov-Smirnov* pada SPSS. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, nilai variabel pengganggu terdistribusi normal atau mendekati normal. Jika nilai *Sig (2-tailed)* lebih besar dari pada nilai *level of significant 0,05* maka data penelitian ini berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji statistik non-parametik *Kolgomorov-Smirnov* hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0,184 atau dengan kata lain lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1. Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	6,895	2,605	
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,041	0,077	0,068
Standar Akuntansi Pemerintah	0,191	0,056	0,443
<i>Good Governance</i>	0,190	0,086	0,229
Sistem Pengendalian Internal	-0,066	0,089	-0,074

Dari hasil analisis uji regresi dapat dilihat model regresi penelitian ini yaitu:

$$Y = 6,895 + 0,041X_1 + 0,191X_2 + 0,190X_3 - 0,066X_4$$

Persamaan regresi linier dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. konstanta sebesar 6,895 artinya jika variabel Kompetensi SDM (X1), SAP (X2), *Good Governance* (X3), dan SPI (X4) diasumsikan nol, maka besarnya Kualitas LKPD adalah 6,895 satuan.
2. Koefisien regresi Kompetensi SDM (X1) sebesar 0,041 (positif), menyatakan bahwa setiap terjadinya kenaikan kompetensi SDM 1 satuan maka akan meningkatkan Kualitas LKPD sebesar 0,041 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
3. Koefisien regresi Standar Akuntansi Pemerintah (X2) sebesar 0,191 (positif), menyatakan bahwa setiap terjadinya kenaikan SAP 1 satuan maka akan meningkatkan Kualitas LKPD sebesar 0,191 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
4. Koefisien regresi *Good Governance* (X3) sebesar 0,190 (positif), menyatakan bahwa setiap terjadinya kenaikan *Good Governance* 1 satuan maka akan meningkatkan Kualitas LKPD sebesar 0,190 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
5. Koefisien regresi Sistem Pengendalian Internal (X4) sebesar -0,066 (negatif), menyatakan bahwa setiap terjadinya peningkatan SAP 1 satuan maka akan menurunkan Kualitas LKPD sebesar 0,066 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

5. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen.

Tabel 2. Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,595 ^a	0,354	0,324

Besarnya uji koefisien determinasi dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,324 yang menunjukkan bahwa variabel-variabel independen pada penelitian ini dapat menjelaskan 32,4% variasi variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya variabel independen kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, good governance, dan sistem pengendalian internal mampu menjelaskan sebesar

0,324 atau 32,4% dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sisanya yaitu 67,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

6. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah model regresi layak digunakan (fit). Model regresi dikatakan layak (fit) apabila nilai signifikansi < 0,05.

Tabel 3. Uji F (Simultan)

Model	F	Sig.
Regression	11.668	0,000 ^b

Besarnya uji F menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 atau dengan kata lain lebih kecil nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,05. Berdasarkan hasil uji F tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini dalam kondisi layak untuk diinterpretasikan.

7. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila memiliki nilai signifikansi < 0,05. Sebaliknya, variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansinya > 0,05.

Tabel 4. Uji T (Parsial)

Hipotesis	Keterangan	Standardized Coefficient (Beta)	Sig.	Kesimpulan
H ₁	X ₁ ⊕ Y	0,068	0,594	Tidak Terdukung
H ₂	X ₂ ⊕ Y	0,443	0,001	Terdukung

H ₃	X ₃ ⊕ Y	0,229	0,031	Terdukung
H ₄	X ₄ ⊕ Y	-0,074	0,459	Tidak Terdukung

E. Pembahasan

1. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Dari hasil analisis frekuensi jawaban responden pada variabel ini paling rendah pada pernyataan pertama yaitu pemahaman tentang Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 yang artinya sebagian pegawai belum mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai PP tersebut. Dilihat dari latar belakang pendidikan responden di bidang akuntansi sebesar 30% atau berjumlah 27 responden sedangkan yang latar belakang pendidikan di luar bidang akuntansi sebesar 70% atau berjumlah 63 responden, dan juga dilihat dari keikutsertaan responden terhadap diklat atau pelatihan di bidang ekonomi, responden yang pernah mengikuti diklat/ pelatihan di bidang ekonomi sebesar 31,1% atau berjumlah 28 responden sedangkan responden yang belum pernah mengikuti diklat/ pelatihan di bidang ekonomi sebesar 68,9% atau berjumlah 62 responden. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan kurangnya pegawai yang pernah mengikuti diklat/ pelatihan di bidang ekonomi, sehingga kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Klaten.

2. Pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil penelitian ini didukung dari analisis deskriptif yang menunjukkan frekuensi jawaban responden sebesar 87,9% responden menjawab pernyataan dengan setuju dan sangat setuju, rata-rata responden menjawab setuju untuk setiap indikator penilaian, yang artinya dari tujuh belas indikator tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah di OPD Kabupaten Klaten sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan tidak mengalami masalah.

3. Pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil penelitian ini didukung dari analisis deskriptif yang menunjukkan frekuensi jawaban responden pada variabel *good governance* dapat disimpulkan bahwa sejumlah 88 responden atau 97,9% responden menjawab setuju dan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa OPD di Kabupaten Klaten telah melaksanakan *good governance* pada proses pemerintahan dengan baik sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.

4. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Dari hasil analisis frekuensi jawaban responden pada variabel ini paling rendah pada pernyataan pertama yaitu melakukan sidak terhadap catatan akuntansi, fisik kas, dan barang. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Kabupaten Klaten tahun anggaran 2017 ditemukan ada kelemahan pada Sistem Pengendalian Internal (SPI) salah satunya adalah penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Klaten 2017 belum didukung pengendalian yang memadai, diantaranya kebijakan akuntansi yang ditetapkan belum dijalankan secara optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, sistem informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan belum terintegrasi, pencatatan dan penyajian informasi serta penjelasan selisih atas analisa hubungan antar akun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten TA 2017 belum optimal sehingga berpotensi mengganggu kewajaran laporan keuangan.

F. Kesimpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan uji regresi linier berganda, maka dari empat hipotesis yang diajukan dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. *Good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Keterbatasan

1. Dalam penelitian ini ada responden yang tidak mengisi beberapa pernyataan dalam kuesioner secara lengkap dikarenakan kesibukan pada salah satu OPD tersebut, sehingga ada kuesioner yang tidak dapat diolah.
2. Berdasarkan model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, *good governance*, dan sistem pengendalian internal terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah hanya menjelaskan sebesar 0,324 atau 32,4% dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sisanya yaitu sebesar 67,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

3. Saran

1. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya sebaiknya menjelaskan tujuan kuesioner dengan jelas pada saat memberikan kuesioner tersebut agar responden dapat mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menambahkan variabel-variabel independen lain yang dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, karena empat variabel independen dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan sebesar 32,4% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Pihak OPD Kabupaten Klaten

OPD Kabupaten Klaten disarankan tetap menerapkan standar akuntansi pemerintah dan *good governance* dengan baik untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dilakukan penekanan untuk pegawai yang akan bekerja di bagian keuangan OPD Kabupaten Klaten agar berlatar belakang pendidikan akuntansi dan disarankan untuk mengikuti diklat/ pelatihan di bidang ekonomi. Diperkuat lagi sistem pengendalian internal dalam OPD Kabupaten Klaten agar meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Anggreni, N. M. M., Widanaputra, A. A. G. P., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2018). Pengaruh Good Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22, 352–380.
- Evi Cahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 5.3 (2016) : 403-428 *Analisis*, 3, 403–428.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25* (9th Ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah Dan Pengalaman Pengalaman*. Yogyakarta: Bpfe.
- Herawati, T. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan(Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)*. Xi(1).
- Herawati, T., & Nopianti, D. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Xiv(2).
- Jensen, & Meckling. (1976). The Theory Of The Firm : Manajerial Behaviour, Agency Cost, And Ownership Structure. *Journal Of Financial And Economics*, 3:305-360.
- Kiranayanti, I. A. Enny, & Erawati, Ni Made Adi. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia , Sistem Pengendalian Intern , Pemahaman Basis Akruar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16, 1290–1318.
- Komarasari, Warih. (2016). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada Skpd Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi Dan Keuangan)*.
- Kurniasari, Aprilia. (2018). *Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Good Governance Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Dinas Kabupaten Bantul)*.
- Mangkunegara, A. . A. P. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 874–890.
- Pangastuti, F. A. (2018). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas*

Laporan Keuangan Perbankan Syariah Di Yogyakarta.

- Rasdianto, E. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Penerbit Brama Ardian.
- Ratifah, I., & Ridwan, M. (2012). *Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. 11(1), 29–39.
- Roviyantie, Devi. (2011). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Sari, Nilam. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sap, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bu. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Ekonomi 3.1*, (1478-1490.).
- Sari, I. G., & Fadli. (2016). Pengaruh Penerapan Good Governance , Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu). *Unib Scholar Repository*.
- Sekaran, U. (2011). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian* (Edisi 6, B). Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sudiaranti, N. M. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara, Medan*.
- Suryaningsum, S., Effendi, M. I. E., Gusaptono, R. Hendry, & Sultan. (2015). *Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Dan Indeks Pembangunan Manusia*. 13(April).
- Warisno. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. *Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan*.